

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah:

1. Sebaiknya mahasiswa sebagai calon apoteker harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada saat melaksanakan PKPA dapat langsung mengaplikasikannya secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien dan mengakibatkan kerugian dalam apotek.
3. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan efek samping dan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat mengungkapkan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan peran apoteker dapat berfungsi secara optimal serta dapat menerapkan *Patient Medication Record*

(*PMR*) sebagai salah satu wujud pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk menjalankan peran apoteker dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI., 2005, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI., 2016, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat Tertentu yang Sering di Salah Gunakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Kliniik. 2007. Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

- Gunawan, G.S., Nafrialdi R.S., and Elysabeth, 2012, *Farmakologi dan terapi, edisi 5*, Jakarta: FKUI
- Hartini S. Y dan Sulasmono, 2007, *Apotek*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- Maat Suprpto, Nofiarny Dwi, Tjandrawinata Raymond R., 2005, Effects of standardized Phyllanthus Niruri extract on changes in immunological parameters: correlation between pre-clinical and clinical studies, *Dexa Media*, **18**(3): 89.
- Mancia, G, De Baker G, Dominiczak A, Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. *Euro Heart J.* 2007;28:1462-1536.
- McEvoy, Gerald K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2018. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Agustus 2018.
- Menteri Kesehatan RI, 2010, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/ MENKES/ 159/ 2010 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah. Kementrian Kesehatann RI, Jakarta.

- Menteri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Menteri Kesehatan; Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi*, Menkes RI, Jakarta.
- MIMS. 2016. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Juni 2018.
- Nuryati, 2017, Bahan Ajar Rekam Medis, Jakarta, Kementerian Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta.
- Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek nomor 35 tahun 2014*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/Menkes/Per/V/2011 *tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.

*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017
tentang Apotek, Jakarta*

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Shokunbi dan Odetola. 2008. Gastroprotective and antioxidant activities of *Phyllanthus amarus* extracts on absolute ethanol-induced ulcer in albino rats. *Journal of Medicinal Plants Research*. **2(10)**: 261-67.

Sweetman, S.C. (2009). *Martindale 36 The Complete Drug Reference*. London: The Pharmaceutical Press.

Tatro D.S. (2003). *A to Z Drug Facts*. San Francisco: Facts and Comparisons.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tentang *Paten*, Jakarta